

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan yang diajukan dan hasil analisis data yang diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa museum MP tidak melakukan pelaporan keuangan melainkan membuat surat pertanggungjawaban. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan badan yang semestinya melakukan pelaporan keuangan. Dalam pelaporannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mengungkapkan *heritage assets* yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kedepannya diharapkan dapat mengungkapkan secara jelas *heritage assets* yang dimiliki oleh negara yang dikelola oleh satuan-satuan kerja dibawahnya. Pengungkapan yang dilakukan harus mencakup jenis barang yang dimiliki dan jumlah barang yang dimiliki oleh museum tersebut.

Adapun perbedaan antara PSAP no 7 dan ASB no 30 adalah untuk PSAP tidak diharuskan *heritage assets* di laporkan dalam neraca namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sementara itu untuk ASB no 30, *heritage assets* wajib dilaporkan dalam neraca, namun jika tidak tersedia data yang obyektif atas nilai dari *heritage assets* tersebut maka hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya

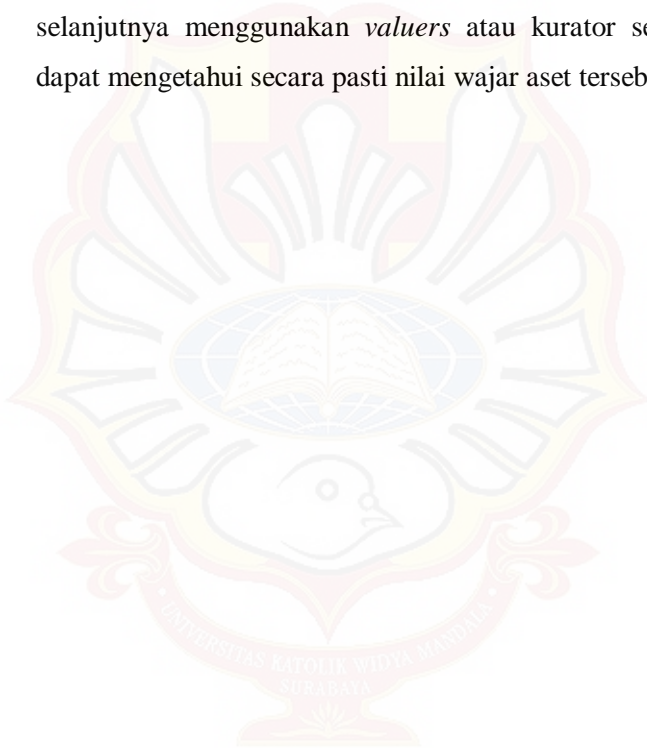
praktik dari kedua standar diatas hampir sama dan memiliki hasil akhir yang sama.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a Hendaknya tiap bagian keuangan atau bagian yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan dan pencatatan *heritage assets* memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penilaian *heritage assets* sehingga tiap satuan kerja dapat melaporkan secara andal *heritage* yang dimiliki.
- b Diharapkan *stock opname* dapat dilakukan secara berkala dan hasilnya dapat dilaporkan sebagai Barang Milik Negara, dengan tujuan agar setiap barang dapat diketahui secara pasti keberadaannya serta jenis barang koleksi yang tercantum di catatan atau kartu inventaris dapat diketahui jenisnya.
- c Penelitian ini memiliki kekurangan dalam penentuan harga pembanding. Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan data pembanding lain seperti harga pasar lelang.

- d Tidak adanya *valuers* menyebabkan barang hanya dinilai dengan harga pasar sesungguhnya, namun harga tersebut tidak menggambarkan harga wajar dari *heritage assets* khususnya untuk koleksi. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya menggunakan *valuers* atau kurator sehingga dapat mengetahui secara pasti nilai wajar aset tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, 2005, Undang-Undang Republik Indonesia tentang benda-benda cagar budaya, BPK Jawa timur
- Barton, A. D., 2000, Accounting for Public Heritage Facilities – Assets or Liabilities of The Government?, *Jurnal Accounting, Auditing and Accountability*, Vol. 13, No. 2:219 – 235.
- Hendriksen, E. S., 1982, *Accounting Theory*, Homewood,III:Richard D. Irwin Inc.
- Hendriksen, Eldon S. and Michael F. Van Brenda, 1992, *Accounting Theory*, Chicago:Irwin.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Institute of Chartered Accountants*, 2009, *Accounting Standard Board, United Kingdom:Accounting Standard Board*, www.icaew.com/index...ga/.../FRS_30_Heritage_Assets.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*, Jakarta: Salemba Empat.

Schroeder, Richard G. and Myrtle W. C., 1998, *Accounting Theory: Text and Readings*, New York: John Wiley & Sons.

Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan*, Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Tanjung, A.H., 2007, *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah)*, Bandung:Alfabeta.

Wikipedia: Nusantara pada periode prasejarah, diakses 10 September, 2009, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_pada_era_prasejarah.

Wikipedia: Sejarah Nusantara Pada Era Kerajaan Hindu-Budha, diakses 10 September, 2009, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_pada_era_kerajaan_Hindu-Budha

Yogaswara, W., 2009, *Bagaimana Mendirikan Sebuah Museum*, www.budpar.go.id.

Yusuf, Mundzirin (editor), 2006, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA.